

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGHASIL EMISI KARBON ATAS
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM YANG DIALAMI OLEH NEGARA
BERKEMBANG PULAU KECIL (*SMALL ISLAND DEVELOPING
STATES*)**



OLEH:

NUR INDAH APRIANI TIBAN

NIM. 031811133212

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGHASIL EMISI KARBON ATAS
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM YANG DIALAMI OLEH NEGARA
BERKEMBANG PULAU KECIL (*SMALL ISLAND DEVELOPING
STATES*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum
NIP. 196110051987012001

Penyusun,



Nur Indah Apriani Tiban
NIM. 031811133212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Pengui pada tanggal 19

Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua :

Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001



Anggota :

1. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
NIP. 196110051987012001



2. Jani Purnawanty, S.H., S.S., LL.M.
NIP. 197001101998022001



3. Riadhy Arafah, S.H., LL.M (Adv.)
NIP. 198504212008121001



4. Franky Butar Butar, S.H., M. Dev.
NIP. 198008182006041002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Nur Indah Apriani Tiban

NIM : 031811133212

BIDANG MINAT : Internasional

JUDUL SKRIPSI : Tanggung Jawab Negara Penghasil Emisi Karbon atas Dampak Perubahan Iklim yang Dialami Oleh Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Nur Indah Apriani Tiban

NIM. 031811133212

MOTTO

“In my imperfection I strive to understand better”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya dalam penyelesaian Skripsi penulis yang berjudul **Tanggung Jawab Negara Penghasil Emisi Karbon atas Dampak Perubahan Iklim yang Dialami Oleh Negara Berkembang Pulau Kecil (*Small Island Developing States*)** dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Namun, dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini penulis sampaikan terima kasih dan hormat penulis kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji yang telah membantu; mendukung; dan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk memperhatikan, memotivasi dan membimbing penulis sebagai individu dan mahasiswa bimbingan skripsi;

3. Ibu Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bantuan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
4. Bapak dan Ibu dosen penguji sidang Proposal dan Skripsi yang telah memberi saran serta arahan dalam penulisan dan perbaikan skripsi ini;
5. Mama, Alm. Ayah dan kedua adik Penulis yang berarti segalanya bagi Penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen; staf akademik, kemahasiswaan, dan keuangan serta jajarannya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, motivasi, dan bantuan serta bertukar cerita dengan penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Keluarga Jessup Moot Court dan ILSA Chapter UNAIR;
8. Sahabat dekat, teman, dan rekan-rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Airlangga; dan
9. Semua Pihak yang senantiasa berkontribusi dalam penulisan karya ilmiah ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan menambah wawasan pembaca serta berguna untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum internasional.

Surabaya, 28 Juli 2022

Nur Indah Apriani Tiban

ABSTRAK

Sebagai negara penghasil emisi terkecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Negara Berkembang Pulau Kecil atau *Small Island Developing States* (SIDS) membutuhkan aturan hukum lingkungan internasional yang dapat memberikan perlindungan terhadapnya. Hukum lingkungan internasional belum mengatur mengenai tanggung jawab negara yang kegiatannya menghasilkan emisi karbon dan berkontribusi signifikan atas terjadinya perubahan iklim.

Penelitian hukum ini mengkaji SIDS sebagai negara terdampak perubahan iklim dan tanggung jawab negara penghasil emisi karbon atas dampak perubahan iklim yang dialami oleh SIDS. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menganalisis berbagai sumber hukum internasional, baik utama dan sekunder.

Hasil dari penelitian hukum ini adalah masih ada kekosongan hukum dalam hukum lingkungan internasional yang mengatur ketentuan mengenai SIDS dan tanggung jawab negara atas perubahan iklim. Meskipun demikian, SIDS dapat mendirikan tanggung jawab negara atas pelepasan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim dengan menggunakan berbagai sumber kewajiban negara yang telah diatur dalam hukum internasional, memanfaatkan berbagai forum litigasi serta berpartisipasi dalam negosiasi dan perkembangan hukum lingkungan internasional. **Kata kunci:** perubahan iklim, SIDS, tanggung jawab negara.

ABSTRACT

As the countries who contribute the least to emit carbons and are vulnerable to the adverse effects of climate change, Small Island Developing States (SIDS) require safety from the international environmental law. There has yet been binding agreement on international environmental law which governs the responsibilities of States on climate change.

This legal research examines the SIDS as countries who are affected by climate change and the development of States' responsibilities on adverse impacts of carbon emissions. The author employs the statutory approach and conceptual approach to analyze various sources of international law, both primary and secondary.

As a result, there is still a legal vacuum in international environmental law which governs the rules on SIDS and States' responsibilities in the context of climate change. However, SIDS can establish the arguments on States' responsibility for the release of carbon emissions which prompts the adverse effects of climate change by using various sources of States' obligations governed under international law, utilizing several litigation forums, as well as participating in negotiations and developments of international environmental law.

Keywords: *climate change, SIDS, states' responsibility*

DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL

Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5.

UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13.

UN General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities : resolution / adopted by the General Assembly, 24 January 2007, A/RES/61/106.

UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3.

UN General Assembly, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, 18 December 1990, A/RES/45/158.

UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3.

United Nations, Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, No. 26369, 1 January 2019.

United Nations, Convention on Biological Diversity, 5 June 1992, United Nations, Treaty Series, vol. 1760, p. 79.

United Nations, Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 11 December 1997, United Nations, Treaty Series, vol. 2303, p. 162.

United Nations, Paris Agreement, 12 December 2015, United Nations, Treaty Series, vol. 3156, p. 107.

United Nations, Statute of the International Court of Justice, 18 April 1946, United Nations, Treaty Series 993.

United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, 21 March 1994, Treaty Series, vol. 1771.

United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, Treaty Series, vol. 1155, p. 331.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5939.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim), Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3557.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Andrejeva v. Latvia, Appl. No. 55707/00, Council of Europe: European Court of Human Rights, 18 February 2009.

Committee on the Rights of the Child, Sacchi v. Argentina, 22 September 2021, (CRC/C/88/D/104/2019).

European Court of Human Rights, Duarte Agostinho & Others v. Portugal and Others, ECHR Case No. 39371/20.

Hoge Raad (Supreme Court) 20 December 2019, State of the Netherlands v. Urgenda Foundation, ECLI:NL:HR:2019:2007.

Inter-American Court of Human Rights, The Environment and Human Rights (State Obligations in Relation to the Environment in the Context of the Protection and Guarantee of the Rights to Life and to Personal Integrity – Interpretation and Scope of Articles 4(1) and 5(1) of the American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-23/18, Inter-Am. Ct. H.R., (ser. A) No. 23, November 15, 2017.

International Arbitral Awards, Case concerning the difference between New Zealand and France concerning the interpretation or application of two agreements, concluded on 9 July 1986 between the two States and which related to the problems arising from the Rainbow Warrior Affair, Award of 30 April 1990.

International Tribunal for the Law of the Sea, Arctic Sunrise Case, (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Case No. 22, Order of November 22, 2013.

Juliana v. United States, 947 F.3d 1159 (9th Cir. 2020).

Mahkamah Internasional, *Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, Judgment of 30 November 2010, ICJ Reports 639.*

Mahkamah Internasional, *Case Concerning Ahmadou Sadio Diallo, (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary Objections, Judgment of 24 May 2007, ICJ Reports 582.*

Mahkamah Internasional, *Case Concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), Judgment of 31 March 2004, ICJ Reports 12.*

Mahkamah Internasional, *Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment of 5 February, Second Phase, ICJ Reports 3.*

Mahkamah Internasional, *Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation, Judgment of 2 February 2018, ICJ Reports 15.*

Mahkamah Internasional, *Corfu Channel, (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Merits, Judgment of 9 April 1949, ICJ Reports 4.*

Mahkamah Internasional, *Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*,

Judgment of 25 September 1997, ICJ Reports 7.

Mahkamah Internasional, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*,

Advisory Opinion of 8 July 1996, ICJ Reports 226.

Mahkamah Internasional, *Military and Paramilitary Activities in and against*

Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment of 27

June 1986, ICJ Reports 14.

Mahkamah Internasional, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay)*,

Judgment of 20 April 2010, ICJ Reports 14.

Mahkamah Internasional, *Question relating to Settlers of German Settlers in*

Poland, Advisory Opinion of 1923, P.C.I.J., Series B, No. 6, p. 22.

Mahkamah Internasional, *Reparation for Injuries Suffered in the Service of the*

United Nations, Advisory Opinion of 11 April 1949, ICJ Reports 174.

Mahkamah Tetap Internasional, *Factory at Chorzow (Germany v. Poland)*,

Judgment of 26 July 1927, Jurisdiction, PCIJ (Series A) No. 9.

Mahkamah Tetap Internasional, *Factory at Chorzow (Germany v. Poland)*,

Judgment of 13 September 1928, Merits, PCIJ (Series A) No. 17.

Mahkamah Tetap Internasional, *Phosphates in Morocco, Judgment, 1938, P.C.I.J.,*

Series A/B, No. 74.

Permanent Court of Arbitration, In the Matter of the South China Sea Arbitration

(Phil. v. China), PCA Case No. 2013- 19, Award (Perm. Ct. Arb. 2016),

Award of 12 July 2016.

Reports of International Arbitral Awards, Trail Smelter Case, United States v

Canada, 11 March 1941, 3 UNRIAA 1905.

DAFTAR SINGKATAN

AIIMS	<i>Atlantic, Indian Ocean, Mediterranean and South China Sea</i>
AOSIS	<i>Alliance of Small Island States</i>
ARSIWA	<i>Articles on States Responsibility for Internationally Wrongful Acts</i>
CBDR	<i>Common But Differentiated Responsibilities</i>
CBDR-RC	<i>Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities</i>
CEDAW	<i>Committee on the Elimination of Discrimination against Women</i>
CESCR	<i>Committee on Economic, Social and Cultural Rights</i>
CMW	<i>Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>
COP	<i>Conference of the Parties</i>
COSIS	<i>Commission of Small Island States on Climate Change and International Law</i>
CRC	<i>Committee on the Rights of the Child/ Convention on the Rights of the Child</i>
CRPD	<i>Committee on the Rights of Persons with Disabilities/ Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>
CSOs	<i>Civil Society Organisations</i>
CVF	<i>Climate Vulnerable Forum</i>
E.g.	<i>Exempli gratia</i>
ECtHR	<i>European Court of Human Rights</i>

GHG	<i>Greenhouse Gas</i>
GMST	<i>Global Mean Surface Temperature</i>
GRK	Gas Rumah Kaca
IACHR	<i>Inter-American Court of Human Rights</i>
<i>Ibid.</i>	<i>ibidem</i> , pada tempat yang sama
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICEDAW	<i>International Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ICMW	<i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>
ICSID	<i>International Centre for the Settlement of Investment Dispute</i>
ILC	<i>International Law Commission</i>
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
<i>Loc.Cit</i>	<i>loco citato</i> , pada tempat yang telah disebut/dikutip
MSI	<i>Mauritius Strategy of Implementation</i>
NDC	<i>Nationally Determined Contributions</i>
<i>Op.Cit</i>	<i>opere citato</i> , dalam karya yang telah disebut/dikutip
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCA	<i>Permanent Court of Arbitration</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
SAMOA	<i>SIDS Accelerated Modalities of Action</i>
SIDS	<i>Small Island Developing States</i>

UN-OHRLLS	<i>United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNGA	<i>United Nations General Assembly</i>
<i>vide</i>	lihat
WTO	<i>World Trade Organization</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SIDS yang termasuk anggota PBB dan tidak dikategorikan sebagai Negara Kurang Berkembang (<i>Least Developed Countries</i>)	16
Tabel 2. SIDS anggota PBB yang termasuk Negara Kurang Berkembang (<i>Least Developed Countries</i>)	17
Tabel 3. SIDS non-anggota PBB	17
Tabel 4. Negara penghasil emisi karbon terbesar menurut <i>Climate Watch</i>	35
Tabel 5. Negara penghasil emisi karbon terbesar menurut GCP	36

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	II
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	IV
MOTTO	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL	X
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	XII
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	XIII
DAFTAR SINGKATAN.....	XVII
DAFTAR TABEL.....	XX
DAFTAR ISI.....	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5

1.5. Keaslian Penelitian	5
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Tipe Penelitian.....	8
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6.6. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL (<i>SMALL ISLAND DEVELOPING STATES</i> ATAU SIDS) SEBAGAI NEGARA TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM.....	13
2.1. Negara Berkembang Pulau Kecil (<i>Small Island Developing States</i> atau SIDS).....	13
2.1.1. Definisi Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS).....	13
2.1.2. Daftar Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS).....	15
2.2. SIDS sebagai Negara yang Rentan terhadap Perubahan Iklim.....	18
2.2.1. Perubahan Iklim	19
2.2.2. Dampak Perubahan Iklim	23
2.3. Peran SIDS dalam perkembangan Hukum Lingkungan Internasional.....	25
2.4. Perlindungan Hukum Internasional terhadap SIDS.....	27
2.4.1. Berdasarkan United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 (UNFCCC)	28
2.4.2. Berdasarkan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change 1997 (Protokol Kyoto).....	29
2.4.3. Berdasarkan <i>Paris Agreement</i> 2015.....	31
2.4.4. Berdasarkan Glasgow Climate Pact 2021	32
 BAB III TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGHASIL EMISI KARBON TERHADAP NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL (<i>SMALL ISLAND DEVELOPING STATES</i> ATAU SIDS) ATAS DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	34
3.1. Negara Penghasil Emisi Karbon.....	34
3.2. Konsep Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional	38
3.2.1. Tanggung Jawab Negara menurut <i>Articles on States Responsibility for Internationally Wrongful Acts</i> (ARSIWA)	39
3.2.2. Kewajiban Negara Berdasarkan Hukum Kebiasaan Internasional.....	45
3.2.3. Kewajiban Negara Berdasarkan Perjanjian Internasional.....	53

3.2.4. Kewajiban Negara Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional	56
3.3. Konsekuensi Atas Suatu Pelanggaran Internasional	65
3.3.1. Kewajiban Negara Untuk Menghentikan Pelanggaran Terhadap Suatu Kewajiban Internasional (<i>Cessation</i>).....	65
3.3.2. Kewajiban Negara atas Ganti Rugi (<i>Reparation</i>) dalam Hukum Internasional	65
3.4. Upaya Hukum Tuntutan Tanggung Jawab Negara Atas Perubahan Hukum.....	67
3.4.1. Tuvalu (2002).....	67
3.4.2. Palau (2011).....	68
3.4.3. Vanuatu (2021)	69
3.5. Tantangan SIDS atas Penyelesaian Masalah Perubahan Iklim.....	70
3.6. Penguatan Hukum atas Perubahan Iklim dan SIDS	72
3.6.1. Konsep Keadilan Iklim atau <i>Climate Justice</i>	72
3.6.2. Negosiasi Perjanjian Internasional.....	73
3.6.3. Forum Litigasi Internasional	73
BAB IV PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran.....	76
DAFTAR BACAAN.....	78
LAMPIRAN.....	90